**PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG)
DI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Heru Sulistiyo

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
E-mail: herusulistiyo70@gmail.com

ABSTRACT

Development Planning Deliberation Process in Magetan Subdistrict, Magetan Regency, East Java Province. Planning is the process of organizing and determining appropriate actions through deliberation. This process begins with an inventory of needs taking into account the available strength. In development planning meetings, participants must optimize, because the community is the main picker of the results of development. The purpose of this study is to describe the real conditions of the stages of development planning meetings at the sub-district level so that the community generally understands the series of sub-district level development planning deliberation processes, and can participate in achieving better results. The government must absorb input from the bottom in addition to providing information about the priority level and strength of the indicative ceiling, to create integration, synchronization and synergy between the region and the center. The method used in this study is descriptive method, which describes the real conditions based on the processes and facts that exist. The result is that Magetan Subdistrict has carried out development planning deliberations smoothly, in accordance with the technical guidelines set by the District Government. Sub-district level development planning meetings are participatory development planning forums, from top to bottom, and from the bottom up.

Keywords: *planning, society participation, integration, synergy*

ABSTRAK

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Perencanaan adalah proses untuk mengatur dan menentukan tindakan yang tepat melalui musyawarah. Proses ini dimulai dengan inventarisasi kebutuhan dengan mempertimbangkan kekuatan yang tersedia. Dalam Musyawarah perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan peserta, karena masyarakat adalah pemetik utama dari hasil pembangunan. Tujuan penelitian ini menggambarkan kondisi nyata tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sehingga masyarakat pada umumnya memahami rangkaian proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, dan dapat ikut berpartisipasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pemerintah harus menyerap

input dari bawah selain memberikan informasi tentang tingkat prioritas dan kekuatan plafon indikatif, untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara wilayah dengan pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi nyata berdasarkan proses dan fakta yang ada. Hasilnya diketahui bahwa Kecamatan Magetan telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan dengan lancar, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas.

Kata kunci: perencanaan, partisipasi masyarakat, integrasi, sinergi.

PENDAHULUAN

Persoalan pemerintahan terutama berkaitan dengan siapa sesungguhnya yang akan menjadi pemetik manfaat utama (*beneficiaries*) dari penyelenggaraan pemerintahan. Bagi suatu negara demokratis, maka jawaban pertanyaan ini jelas: rakyat. Dengan demikian rakyatlah yang menjadi sumber utama inspirasi dan aspirasi dari setiap penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan penegasan ini, maka persoalan pemerintahan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimanakah inspirasi dan aspirasi rakyat itu dikelola secara sepatutnya. (Muchlis Hamdi, 2002: 126). Pengelolaan inspirasi dan aspirasi itu diawali dengan memunculkan inventarisasi daftar kebutuhan, yang selanjutnya dibingkai dalam sistem perencanaan.

Telah banyak uraian dan definisi konsep dasar tentang perencanaan yang maknanya sangat luas karena kesemuanya mempunyai ruang lingkup. Dalam teori perencanaan ada tiga hal utama yang perlu dipahami, (a) definisi perencanaan, (b) substantif perencanaan, yaitu apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya, dan (c) normatif perencanaan yaitu bagaimana dan apa

alasan perencanaan yang akan disusun. (Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarsa, 2017: 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Ketentuan Umum Pasal 1, menegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya mengacu pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan, menurut sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima proses pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Bentuk partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam forum musyawarah yang kemudian dituangkan dalam daftar kebutuhan, yang terkadang tidak semua bisa terealisasikan. Berbagai kemungkinan terjadi karena kurangnya informasi, tidak masuk dalam skala prioritas kabupaten, keterbatasan anggaran, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Pada tulisan ini penulis akan mendeskripsikan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, yaitu suatu perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta pendekatan atas bawah dan bawah atas yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan untuk diselaraskan melalui *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*, dengan locus penelitian di *Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur*.

Maksud dari penulisan ini agar mendapatkan gambaran nyata tentang tahapan pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan dengan tujuan untuk memberi kontribusi kepada para pembaca pada umumnya tentang rangkaian proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif

analisis. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan suatu cara pemecahan masalah dengan cara menggambarkan suatu objek. Objek yang digambarkan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Metode deskriptif analisis juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan fakta atau melukiskan keadaan berdasarkan fakta yang nampak dan bersifat apa adanya.

Untuk menggambarkan kondisi musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Magetan, metode deskriptif analisis ini paling tepat dipakai dalam penelitian ini. Metode ini dilengkapi pula dengan pendekatan partisipatif masyarakat baik secara *bottom-up* maupun *top-down*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magetan.

VISI: Masyarakat Magetan yang *smart* semakin *mantab* dan lebih sejahtera.

Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil. Masyarakat Magetan yang semakin MANTAB merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari, dan Bermartabat.

MISI: (1) Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil). (2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar

ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah. (3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. (4) Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat. (5) Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional, dan adil.

Tabel 1 Arah Kebijakan Tahunan Selama 5 Tahun Masa RPJMD

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan
2019	PENINGKATAN KINERJA BIROKRASI BERBASIS IT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK PEMBANGUNAN DAERAH BIROKRASI.
2020	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH.
2021	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI TRIPLE AGRO (AGRO WISATA, AGRO INDUSTRI, DAN AGRO BISNIS).
2022	PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM RANGKA MEMPERKUAT DAYA SAING PRODUK LOKAL MELALUI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI.
2023	PENINGKATAN EKSPANSI PASAR UNTUK MEMPERKOKOH EKSTENSIF PRODUK LOKAL

Musrenbang RKPD di Kecamatan Magetan

Peserta:

- 1) Lurah dan Kepala Desa beserta delegasi dari kelurahan/desa se-Kecamatan Magetan
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Magetan asal daerah pemilihan Kecamatan Magetan.
- 3) Perwakilan UPTD OPD Kabupaten.
- 4) Tokoh/organisasi perempuan/PKK
- 5) LPM dan atau BPD dari desa dan kelurahan
- 6) Organisasi masyarakat tingkat kecamatan (Ormas keagamaan, KNPI dll)
- 7) LSM yang berdomisili dan beraktivitas di Kecamatan Magetan
- 8) Pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Narasumber:

- 1) Dari Kabupaten terdiri dari Bappeda, perwakilan OPD, anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Magetan.
- 2) Dari kecamatan terdiri dari camat dan perangkat kecamatan.

Tahapan dan Mekanisme:

- 1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur kecamatan.
- 2) Kecamatan menyampaikan jadwal pelaksanaan Musrenbang desa/ Musbang Kelurahan kepada desa/ kelurahan di wilayahnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan.

- 3) Tim penyelenggara Musrenbang RKPD tingkat kecamatan menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD di kecamatan, mengundang peserta yang terdiri dari unsur pemerintahan desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di wilayahnya.
- 4) Tim penyelenggara menyiapkan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD di kecamatan, yaitu data:
 - a) Daftar kegiatan prioritas kecamatan
 - b) Rekapitulasi hasil Musrenbang kelurahan/desa.

Dengan mengadakan verifikasi usulan kegiatan prioritas dari seluruh kelurahan/desa, untuk dilakukan skoring dan rating tiap kelompok kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Penyelenggaraan:

- 1) Pendaftaran peserta
- 2) Acara Pembukaan Musrenbang oleh Camat
- 3) Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang yang terdiri dari:
- 4) Pemaparan Camat mengenai masalah utama kecamatan (Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran serta masalah aktual lainnya)
- 5) Pemaparan prioritas pembangunan daerah kabupaten oleh Tim Musrenbang Kabupaten Magetan
- 6) Pemaparan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan setempat.

- 7) Pelaksanaan diskusi dengan paparan kegiatan Prioritas Kecamatan dan Rekapitulasi hasil musrenbang desa se-Kecamatan Kartoharjo untuk mendapatkan masukan dari seluruh peserta
- 8) Penentuan kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan oleh peserta musrenbang
- 9) Dipilihnya wakil/ delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten, sebanyak lima orang terdiri dari Camat, kasi PMD dan perwakilan desa sebanyak empat orang.
- Keluaran atau hasil dari Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah berupa dokumen Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampirannya yang terdiri dari:
- Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan yang didanai dari PIK (Pagu Indikatif Kecamatan).
 - Usulan Kegiatan Reguler Kecamatan
 - Usulan Kegiatan yang belum disetujui dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan
 - Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Musrenbang: Peringkat Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) Tahun 2019

No	Kegiatan	Manfaat	Desa/ Kelurahan	Volume	Biaya (Juta)
1	Penyemiran ruas jalan dan makam, menghubungkan dengan kelurahan Alastuwo	Memperlancar Transportasi dan meningkatkan perekonomian	Kelurahan Magetan	3 x 800 m	150
2	Pembangunan saluran irigasi Blok seglutok 3 dan Blok jengger	Meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan	Kelurahan Mangkujayan	300m x 50 cm 200m x 50 cm	150
3	Pembangunan jalan usaha Tani (Talud dan Makadam) Poktan Gedang Agung	Memudahkan transportasi dan kegiatan perekonomian pengangkutan hasil panen serta menunjang program wisata dukuh jejeruk.	Kelurahan Candirejo	2,5 m x 500 m	150
4	Kelurahan Bulukerto Perbaikan plengsengan sungai di jalan Pandan	Untuk mengatasi longsor yang menggerus tanah warga	Kelurahan Bulukerto	10 m	150
5	Lanjutan pembangunan jalan tembus.	Meningkatkan arus perekonomian dan hasil pertanian antar desa dan kelurahan	Kelurahan Selosari	300 m	150
6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (JIT)	M e n i n g k a t k a n produktivitas	Desa Baron	850cm x 50 cm x 50m	150
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier saluran Segagakan	M e n i n g k a t k a n produktivitas pertanian	Kelurahan S u k o - winangun	850m x 60 cm x 500m	

Tabel 2 Usulan Reguler Tahun 2019

No.	Kegiatan	Manfaat	Desa/ Kelurahan	Volume	Biaya (Jt)
1	Pengaspalan jalan desa	Memperlancar hubungan antar kec. Dan mengangkut hasil pertanian	Desa Tambakrejo	3m x 700 m	450
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	M e n i n g k a t k a n produktivitas Pertanian	Desa Purwosari	500m x 1,3 x 90 m	250
3	KEL. TAMBRAN Pavingisasi jalan melati	Transportasi umum menuju kelurahan mangkujayan.	Kel. Tambran	700 m	75
4	Pembangunan jalan usaha tani (makadam)	Memperlancar mobilitas kegiatan pertanian.	Desa Tawanganom	500m x 3m	200
5	Menghias infrastuktur sepanjang bantaran kali tengah.	Mendukung keindahan kota	Kel. Kepolorejo	1000 m	150
6	Pengaspalan jalan menuju makam mbah Badini	Memperlancar jalur transportasi (wisata religi)	Desa Ringinagung	3m x 350 m	135
7	Destinasi wisata kali tengah	Meningkatkan kunjungan wisata	Kel. Kebonagung		500

Musrenbang yang dilaksanakan tahun 2019 di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur adalah perencanaan pembangunan untuk direalisasikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 prioritas pembangunan daerah adalah peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah. Melihat hasil rekapitulasi Musrenbang baik yang masuk dalam pagu indikatif kecamatan maupun usulan reguler, semua desa dan kelurahan tidak terlepas dari prioritas pembangunan daerah. Artinya makna musrenbang sebagai forum partisipasi, klarifikasi, dan sinkronisasi program telah mencapai keselarasan dan kesepakatan yang menghasilkan rencana pembangunan tahunan kecamatan dan daerah.

Perencanaan sebenarnya adalah cara rasional untuk mempersiapkan masa

depan, sehingga sebuah perencanaan selalu diwarnai oleh pendekatan rasional dengan berbasis proses dan konsensus. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Magetan sangatlah rasional karena secara nyata yang telah direncanakan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat, meskipun pada akhirnya tetap ada kecenderungan mengedepankan konsentrasi informasi yang identik dengan konsentrasi kekuasaan (*power*). Sebagaimana informasi pagu indikatif, kemampuan anggaran, skala prioritas pembangunan, termasuk target pelaksanaannya semua telah ditetapkan dan ada ketergantungan dengan kekuasaan pemerintahan di tingkat atasnya.

Pendekatan rasional pada dasarnya menuntut pengetahuan yang komprehensif, dan sebenarnya itu sulit dipenuhi karena keterbatasan kapasitas pengetahuan,

informasi, dan teknologi perencana di tingkat desa/kelurahan. Kalau diupayakan penyelesaiannya, tetap akan ada ketergantungan dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten, karena disisi lainnya Musrenbang adalah tahapan berjenjang yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan sebagaimana tingkatan dalam sistem pemerintahan.

Dengan demikian maka semua pelaku pembangunan perlu kembali pada konsep dasar perencanaan, untuk siapa kegiatan itu direncanakan dan siapa yang akan memetik manfaat utama dari penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Maka Musrenbang sebagai ruang partisipasi masyarakat harus didengar dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Karena, pembangunan merupakan suatu proses yang rumit. Ia tidak bisa dibiarkan dalam tangan kekuasaan yang terpusat. (Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto: 9).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diambil simulant sebagai berikut.

- Kecamatan Magetan telah melaksanakan Musrenbang dengan lancar, sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan merupakan Forum perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, atas bawah (*top down*), dan bawah atas (*bottom up*).
- Ketergantungan dalam pendekatan rasional perencanaan pembangunan merupakan bagian dari proses integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas.
- Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang menjadi fokus perhatian pemerintah kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, Rochajat, Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2001. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Mahi, Ali Kabul, dan Sri Indra Gunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Depok: Kencana,
- Pedoman Pelaksanaan Musrenbang 2019 Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.